

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker pada Apotek Kimia Farma 603 Gedangan, antarlain:

1. Mahasiswa PKPA perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian, kepercayaan diri dan pembelajaran komunikasi efektif yang diperlukan dalam kegiatan PKPA.
2. Penataan gudang obat yang perlu diperbaiki dalam kemudahan penjangkauan barang (obat).
3. Peningkatan kegiatan farmasi klinis seperti konseling, pendokumentasian *Patient Medication Record*, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan *Home Pharmacy Care* sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.
4. Memperbaiki saluran air pada Apotek Kimia Farma 603 dalam peningkatan pelayanan kefarmasian (pembersihan *tablet crusher*), kenyamanan petugas (Apoteker, Aping, AA) dan pasien.
5. Penandaan pada rak penyimpanan obat yang perlu diperbaiki dan memperhatikan penandaan seperti LASA dan *high alert*.
6. Penggantian rak penyimpanan obat suhu 2-8°C, terkait kurangnya kapasitas ruang penyimpanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005, Manajemen Farmasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- British National Formulary* 76 ed, 2019, BNF.ORG, London.
- Depkes RI, 2007, Pedoman *Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*, Direktorat bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta
- Depkes RI, 2011, Buku Saku Petugas Kesehatan Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare), Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta
- Drug Bank, 2020, Canadian Institutes of Health Research, <https://drugbank.ca/> [online], Diakses pada Maret 2020.
- Graham, Garry G. *et al.*, 2013, The Modern Pharmacology of Paracetamol: Therapeutic Actions, Mechanism of Action, Metabolism, Toxicity and Recent Pharmacological Findings. *Inflammopharmacology* **21**: 201-232.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/ SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/83 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Keputusan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., Lance, L.L., 2009. Drug Information Handbook: A Comprehensive Resource for all Clinicians and Healthcare Professionals, 17th ed. Lexi-Comp Inc, Ohio.
- Marlia, D.L., Dwipoerwantoro P.G, Advani Najib. 2015. Defisiensi Zinc sebagai Salah Satu Faktor Risiko Diare Akut menjadi Diare Melanjut. Sari Pediatri Vol **16 (5)**: 299-306
- Mashuda, A., 2011, Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape. 2020. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Februari dan Maret 2020.
- MIMS, 2020, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/> [online], Diakses pada Februari dan Maret 2020.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diberikan tanpa Resep

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Pionas, 2020, Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://www.pionas.pom.go.id/> [online], Diakses pada Februari dan Maret 2020.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, Manajemen Farmasi Edisi 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Seto, S., Nita, Y., dan Triana, L., 2015, Manajemen Farmasi “Lingkup: Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi”, Edisi 2, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.

- Sweetman, S.C., 2008, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Windarti, Syamsu, Sudarmanto, Irfan Fatomi, 2017. Implementasi Fungsi Haversine untuk Menghitung Jarak antar Apotek Guna Mendukung Pemberian Ijin Lokasi Apotek Baru di Kabupaten Bantul. STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda **Vol 1(1)**.